



# RENCANA KERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

2025

## KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut telah dilakukan revisi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RKA-KL Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Tahun Anggaran 2025, maka di anggap perlu untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025. Penyusunan RKT PPN Pengembangan tahun 2025 ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pencapaian kinerja dari sasaran (target) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari segi fisik maupun segi pembiayaan pada PPN Pengembangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Revisi RKT PPN Pengembangan Tahun 2025 akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja lingkup kinerja PPN Pengembangan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kinerja di PPN Pengembangan.

Jemberana, Januari 2025

Kepala Pelabuhan



**Andi Mannojengi**

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB 1    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Tujuan .....	1
1.3    Dasar Hukum.....	2
BAB 2    PERENCANAAN STRATEGIS .....	3
2.1    Visi dan Misi .....	3
2.2    Sasaran Strategis.....	4
BAB 3    RENCANA KINERJA .....	6
3.1    Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	6
3.2    Rencana Aksi .....	7
BAB 4    PENUTUP.....	10

## Daftar Tabel

Tabel 0-1Target Kinerja PPN Pengambengan Tahun 2025 .....	6
Tabel 0-2Anggaran PPN Pengambengan Tahun 202 .....	7
Tabel 0-3Rencana Aksi .....	7
Tabel 0-4Dukungan Anggaran dari RKAKL.....	8

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program DJPT maka PPN Pengambengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh PPN Pengambengan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan PPN Pengambengan Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pengelolaan perikanan tangkap, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan PPN Pengambengan pada tahun 2025.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

### 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi dari kegiatan perikanan tangkap.
2. **Mandiri** diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. **Berdaya saing** diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. **Berkelanjutan** dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. **Kesejahteraan** diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

## 2.2 Sasaran Strategis

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Seningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Untuk tahun 2025 ada beberapa sasaran kegiatan yang akan dikerjakan serta ditargetkan untuk memenuhi dalam pengukuran dan penilaian kinerjanya PPN Pengambengan.

Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan dengan indikator kinerjanya adalah Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengambengan (Rp juta)
2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan meningkat dengan indikator kinerjanya adalah volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan ( ton)
3. Pengelolaan PPN Pengambengan yang berdaya saing dengan indikator kinerjanya adalah :
  - a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)
  - b) Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)
  - c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)

- d) Persentase Pengendalian pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
- e) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Pengembangan (Nilai)
- 4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan yang optimal dengan indicator kinerja berupa :
  - a) Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
  - b) Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan (nilai)
- 5. terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan PPN Pengembangan dengan indikator kegiatan yaitu
  - a) Nilai PM Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
  - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
  - c) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
  - d) Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
  - e) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
  - f) Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
  - g) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
  - h) Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
  - i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)

## BAB 3

### RENCANA KINERJA

#### 3.1 Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan PPN Pengembangan Tahun 2025, maka target kinerja dan anggaran PPN Pengembangan adalah sebagai berikut (Tabel 1).

**Tabel 3-1 Target Kinerja PPN Pengembangan Tahun 2025**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)	780,487
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	25.372
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	85
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,31
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1.480
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	76
		15 Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	81
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	92
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	71,5
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	88,5

**Tabel 3-2 Anggaran PPN Pengambengan Tahun 2025**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025	TARGET	ANGGARAN
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		256.171.511.000,00
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		256.150.682.000,00
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.000.000,00
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	2.0 Lembaga	450.682.000,00
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.0 Unit	255.650.000.000,00
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		20.829.000,00
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	180.0 laporan	20.829.000,00
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen		11.468.132.000,00
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	1.0 Unit	94.680.000,00
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.969.312.000,00
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2, Paket	130.000.000,00
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	1.0 Orang, Layanan, Rekomendasi	35.000.000,00
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	239.140.000,00

### 3.2 Rencana Aksi

**Tabel 3-3 Rencana Aksi**

NO	IKU	TARGET 2025	NAMA KEGIATAN
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)	780,487	Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	25.372	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan
3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)	100	Evaluasi PNBP dan Kepatuhan Kegiatan Usaha Di Pelabuhan Perikanan
4	Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)	85	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	85	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	10,31	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur

NO	IKU	TARGET 2025	NAMA KEGIATAN
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	30,1	Pengelolaan Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)hi ketentuan (Kapal)	1480	Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0	Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	75,5	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	85	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	88	Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	87	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa
15	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	76	Pengelolaan Penyimpan BMN
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	81	Laporan program dan kegiatan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	92	Laporan program dan keuangan
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	71,5	Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan (IKM)

**Tabel 3-4Dukungan Anggaran dari RKAKL**

NO	IKU	ANGGARAN	NAMA KEGIATAN
1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)	66.488.000	Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	92.249.000	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)	37.110.000	Evaluasi PNBPN dan Kepatuhan Kegiatan Usaha Di Pelabuhan Perikanan
4	Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)	61.341.000	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	114.473.000	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	255.700.000.000	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	117.850.000	Pengelolaan Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)hi ketentuan (Kapal)	-	Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	-	Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	10.710.000	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	35.000.000	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	60.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	10.932.152.000	Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	194.680.000	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa
15	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	2.160.000	Pengelolaan Penyimpan BMN
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	140.140.000	Laporan program dan kegiatan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	39.000.000	Laporan program dan keuangan
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	6.290.000	Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan (IKM)

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan akan lebih mudah melaksanakan manajemen program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.